



*RENCANA KERJA
(RENJA) 2026*

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI



PEMERINTAH KOTA JAMBI
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jl. Jend. Basuki Rachmat Kota Baru Telepon. (0741) 40284 Fax. 40284
J A M B I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA JAMBI

NOMOR 35 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)
PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah diperlukan suatu pedoman atau acuan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk memantapkan akuntabilitas kinerja;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2025-2045;
23. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033;

24. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
25. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2026

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.**
- KESATU** : Menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.
- KEDUA** : Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2026.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 29 Agustus 2025


KEPALA BADAN
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Dra. NELLA ERVINA, MM.Agr, ME
Pengelola Utama Muda
NIP. 19740329 199303 2 001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa maka kami telah menyusun Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2026.

Penyusunan Rencana Kerja ini adalah hal yang penting bagi keberhasilan suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertujuan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaannya.

Jambi, Oktober 2025
KEPALA BADAN

Dr. H. ARDI, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700512 199803 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPRD Tahun lalu dan Capaian Renja BPPRD Kota Jambi	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPPRD Kota Jambi	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi BPPRD Kota Jambi	20
a. Organisasi	20
b. Pendapatan Daerah	22
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD	27
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	34
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	34
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPPRD Kota Jambi	34
a. Tujuan Renja BPPRD Kota Jambi	35
b. Sasaran Renja BPPRD Kota Jambi	35
c. Target Pajak Daerah Tahun 2025	35
3.3 Program dan Kegiatan	36
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	43
BAB V PENUTUP	45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	7
Tabel 2.2	8
Tabel 2.3	9
Tabel 2.4	14
Tabel 2.5	21
Tabel 2.6	23
Tabel 2.7	28
Tabel 3.1	35
Tabel 3.2	37
Tabel 4.1	43

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan yang baik sangat penting dan diperlukan dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dan terangkum dalam visi misi sebuah organisasi. Perencanaan memiliki peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan sebuah organisasi dengan tidak meninggalkan peranan proses pelaksanaan dari perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta tugas pembantuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi serta Peraturan Walikota Jambi Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi. Kewenangan yang diberikan akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan dalam upaya peningkatan pendapatan pajak daerah.

Sebagai sebuah dokumen resmi, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN. Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang

berkembang dan mengimplementasikannya dalam program, kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen renja sangat ditentukan oleh kualitas program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program, kegiatan, dan sub Kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Renja BPPRD Tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Bpprd;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan

Penetapan dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program, kegiatan, dan sub Kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholder*) di daerah sangat dibutuhkan dalam mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini untuk menjamin kesesuaian dokumen perencanaan dengan kebutuhan seluruh *stakeholder*. Oleh karena itu, Perangkat Daerah sebagai salah satu *stakeholder* kunci di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana, melalui penyusunan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah, yang kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja tahunan Perangkat Daerah. Hal ini mengacu pada pasal 7 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi membuat Renja didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Renja melalui enam tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dearah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
 9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2025–2045.
 10. Peraturan Wali Kota Kota Jambi Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2026 adalah memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait, dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan untuk periode 1 (satu) tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

b. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Renja Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2026, yaitu :

1. Menganalisis gambaran pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi;
2. Menganalisis Hasil Evaluasi Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun Lalu;
3. Merumuskan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi; dan
4. Merumuskan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun, sistematika rencana kerja ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Kegiatan review hasil pelaksanaan Renja Bpprd tahun 2024 ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Bpprd dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Bpprd serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Evaluasi pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah merupakan indikator yang sangat penting untuk mengukur tingkat pelayanan dan kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi untuk selanjutnya dilakukan evaluasi-evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKPD) dan laporan keuangan. Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKPD) merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas Laporan Keuangan.

Hasil Kinerja Renja Bpprd Kota Jambi Tahun 2024 terlaksana dengan baik antara lain mengacu pada Kebijakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam mencapai sasaran adalah :

1. Melaksanakan Sosialisasi terkait Regulasi Pajak Daerah.
2. Melaksanakan Tindakan Pengendalian dan Penagihan terhadap Pajak Daerah
3. Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah berbasis Teknologi Informasi
4. Meningkatkan Akuntabilitas Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah
Meningkatkan Kualitas Evaluasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil kinerja Badan Penyelenggara Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi yang dicapai dalam Tahun 2024 untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah, dilaksanakan dengan berbagai Program Kegiatan dengan hasil :

1. Ringkasan Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama BPPRD Kota Jambi

Tabel 2.1

No	Indikator	SPN Standar Nasional	JKK	Target Rencana Peningkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi 2025	Catatan Analisis
				2024	2025	2024 (s.d.Juni)	2024	2025 (s.d.Juni)	2025		
1	Peningkatan Realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah	3	4	0	0	0%	0%	0%	0%	100%	
	Pajak			340.000.000.000	600.000.000.000	330.050.169.349	330.050.169.349	247.398.960.750	400.000.000.000		
	Retribusi Daerah/Penggunaan			30.000.000	30.000.000	0	0	0	30.000.000		

2. Presentase Capaian Kinerja BPPRD Kota Jambi Tahun 2023 dan Tahun 2024

Tabel 2.2

Uraian	2023		%	2024		%
	TARGET	Realisasi		TARGET	Realisasi	
Hotel	30.000.000.000,00	24.228.723.091,00	80,78%	0	0	0
Restoran	85.000.000.000,00	71.472.050.912,00	84,08%	0	0	0
Houses	18.201.000.000,00	16.652.403.252,00	91,48%	0	0	0
Roklam	33.500.000.000,00	9.109.744.157,00	27,48%	9.000.000.000,00	9.861.410.423,00	103,97%
Penerangan Jalan	74.000.000.000,00	79.116.899.006,00	106,91%	0	0	0
Parkir	32.000.000.000,00	6.611.781.621,00	20,66%	0	0	0
Air Tanah	6.040.000.000,00	633.630.603,00	10,49%	990.000.000,00	1.474.399.149,00	148,93%
PDR	31.250.000.000,00	33.240.772.220,00	106,37%	33.000.000.000,00	32.549.033.743,00	98,63%
BPHB	70.000.000.000,00	84.139.870.237,00	120,20%	82.000.000.000,00	76.791.488.672,00	93,65%
PSUT				219.450.000.000,00	209.269.878.062,00	95,36%
Pajak Daerah	326.380.000.000,00	329.266.371.386,00	87,92%	345.000.000.000,00	330.666.169.249,00	95,87%
Retribusi Sewa Pangsaug Billboard	30.000.000,00	0	0	30.000.000,00	0	0
TOTAL	320.410.000.000,00	335.266.371.386,00	87,92%	345.000.000.000,00	330.398.169.249,00	95,87%

3. Anggaran dan Realisasi Daerah BPPRD Kota Jambi Tahun 2024

Tabel 2.3

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI			PERMASALAHAN
			Kinerja	Keuangan	Fiak		Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Penguatan Urutan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	25.590.426.861	B	85,78%	22.974.769.067,91	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penilaian Nilai Akur	A	2.280.245	79,08	A	1.083.275	
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.351.070	3 Dokumen	71,60%	976.000	
2	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	918.275	1 Laporan	99,99%	927.275	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	30.842.260.211	100%	98,36%	18.691.054.821	
3	Penyediaan gaji dan tunjangan sen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Org	20.321.115.134	65 Org	90,20%	18.356.154.641	
4	Pelaksanaan penertanggungjawaban dan pengendalian/verifikasi keuangan dipai	Jumlah Dokumen Penertanggungjawaban dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dok	218.483.977	2 Dok	98,93%	216.192.819	

RIWAYAT PENGUKULAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANGUNAN DAN KAWASAN BANGUNAN

5	Koordinasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan kawasan perumahan di kawasan perumahan	Jumlah Laporan Kegiatan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Kegiatan Bulanan/Triwulan/ Semesteran	2 Lap	102.061.200	2 Lap	78,76%	78.764.361	
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	55,5	449.432.000	1 Paket	83,16%	373.570.719	
6	Pengadaan pakain dinas beserta atribut keorganisasinya	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket	90.130.000	1 Paket	98,66%	88.940.000	
7	Fondikasi dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	12 Org	59.372.000	11 Org	42,89%	25.522,00	Tidak terlaksananya jadwal akhir CPNS Pajak
8	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	25 Org	300.000.000	25 Org	88,37%	269.158.719	
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemertama Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Rencana Kebutuhan Bangun Unitas in (RKBK)	100%	2.579.052.001	100,00%	94,16%	2.429.237.894	
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/bangunan kantor yang disediakan	2 paket	42.940.554	2 paket	85,85%	36.798.100	
10	Penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket perlatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	1.736.850.797	6 Paket	97,58%	1.750.476.450	
11	Pengadaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	1 Paket	43.088.300	1 paket	75,48%	33.205.200	
12	Penyediaan barang ATK dan perlengkapan	Jumlah paket barang ATK dan perlengkapan yang disediakan	1 Paket	33.300.000	3 paket	88,70%	22.212.450	
13	Pengadaan bahan bakar dan peralatan pendukung kendaraan	Jumlah dokumen bahan bakar dan peralatan pendukung kendaraan yang disediakan	1 Dok	3.840.000	1 dok	60,75%	2.680.000	

14	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Laporan fasilitas kunjungan tamu	12 Lap	60.000.000	4 Lap	82,52%	32.110.000	Bojanga sesuai jadwal rapat
15	Penyelinggihan input koordinasi dan konsultasi alpa	Jumlah laporan penyelinggihan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Lap	600.000.000	4 Lap	91,03%	540.900.000	
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemertintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	634.040.030	100,00%	91,68%	581.290.372	
16	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Lap	50.040.000	4 Lap	100%	50.040.000	
17	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Lap	570.000.000	4 Lap	90,84%	515.250.372	
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik (Lagak Pakai)	100%	1.282.433.444	60,33%	73,13%	937.815.688,51	adanya 2 kendaraan dinas yang diujikan untuk diakhir tahun sehingga pembayoran bahan bakar minyak tidak dilaksanakan
18	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan jasa, dan perbaikan kendaraan dinas operasional lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional alat lapangan yang diperbaiki dan dibayarkan pagoknya	37 Unit	654.660.632	37 unit	54,23%	354.094.049	
19	Pemeliharaan perabot dan mesin lainnya	Jumlah perbaikan dan mesin lainnya yang diperbaiki	101 Unit	70.612.782	90 unit	95,61%	70.118.940	
20	Pemeliharaan instalasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang diperoleh direalisasi	2 Unit	548.281.032	2 Unit	92,42%	506.712.067,51	
II	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi pemenuhan pajak dan retribusi daerah	348.000.000,000	10.114.634.139	325.206.719.240	83,17%	8.412.177.821	

REKAM JEJAK PELAKSANAAN KEGIATAN DAN KETERANGAN BERKAS PAPER JAWAB

1	Kegiatan Penginjakan Penerimaan Daerah	Persentase Pemenuhan Wajib Pajak dan retribusi daerah	9%	10.114.024.129		83,71%	8.412.177.824
1	Pencapaian pengalihan pajak daerah	Jumlah dokumen rencana pajak daerah	2 Dok	80.688.825		71,60%	57.798.076
2	Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	1 Dok	165.780.050		84,77%	140.535.109
3	Penyuluhan dan penyortiran kobijakan pajak daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyortiran kebijakan pajak daerah	6 lap	654.724.892		86,64%	565.891.440
4	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Terjadinya sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	11 unit	1.151.386.244		80,38%	925.841.560
5	Pencetakan dan pendistribusian objek pajak daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pencetakan objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	12 lap	1.976.775.199		85,59%	1.693.280.031
6	Pengubahan, pemeliharaan, dan pelacakan basis data pajak daerah	Jumlah laporan hasil pengalihan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	12 lap	1.155.816.229		87,23%	1.008.063.330
7	Penilaian pajak dan anggaran pendapatan dan belanja (PADBAL) serta besa perolehan hak atas tanah dan bangunan	Jumlah objek pajak yang disusulkan MJOJ nya	15.000 Objek pajak	1.914.053.894	13.640 Chek pajak	83,42%	1.590.637.080
8	Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah dokumen penetapan pajak daerah	33.000 Dok	293.608.826	33.000 dok	87,20%	197.268.340
9	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah Layanan dan konsultasi pajak daerah	30.768 Layanan	435.047.076	30.768 layanan	89,00%	387.423.400

10	Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	33.000 Dak	103.563.319	33.000 dak	98,74%	103.266.510		
11	Pemgihan pajak daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pemgihan pajak daerah	3 Dak	1.034.400.900	3 dak	92,04%	932.000.000	Banyaknya pemgihan atas pengajuan subsidi yang dilaksanakan di kantor sehingga mengurangi perjalanan dinas dalam daerah	
12	Penyediaan kebaratan pajak	Jumlah dokumen hasil penyelesaian kebaratan pajak daerah	1 Dak	206.330.810	1 dak	47,81%	90.047.245		
13	Pengendalian, pemfiksasi dan pengawasan pajak daerah	Jumlah dokumen hasil pemfiksasi serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	2 Dak	464.957.060	2 dak	83,57%	205.051.380	Tingkat kepatuhan wajib pajak reklame mulai meningkat sehingga pelaksanaan pengawasan dinas dalam daerah untuk pemfiksasi reklame berkurang	
14	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	4 Lap	177.171.420	12 lap	36,25%	99.833.47%	Efisiensi perjalanan dinas dalam daerah	
J U M L A H								31.386.947.188,51	

Berikut disajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi :

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJIS BPPRD DAN PENCAPAIAN RENJIS S/D TAHUN 2024

Tabel 2.4

No	Subsidi	Program Regulasi	Indikator Kinerja Program (Output/ Kegiatan)	Tingkat Pencapaian Program (Output/ Kegiatan) 2024		Maksimal Capaian Kinerja Rencana Program/ Kegiatan dengan Rencana Anggaran Tahun (Rp. 000.000)	Target Kinerja dan Pengapaan Rincin Puncak/ Capaian Tahun (Rencana) (Tahun 2024) yang direalisasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Biaya Program/ Kegiatan yang direalisasi (Maksimal 100,0, 0, 0, dan 0 Tahun 2024)		Realisasi (Gaji dan Anggaran Bersih) Puncak/ Capaian s/d Tahun 2024
				K	Rp			K	Rp	
1	Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Tarif/ Tarif Daerah	Program	Peningkatan Hasil/ Penerimaan Pajak dan Tarif/ Tarif Daerah	100%	6.811.420.000	100%	10.114.824.120	9%	6.410.097.524	10.940.270.300
				9%	6.411.420.000	9%	10.114.824.120	9%	6.410.107.000	10.940.270.300
		Sub Kegiatan :								
		1. Pemenuhan Perencanaan Pajak Daerah	Adanya Dokumen Perencanaan Perencanaan Pajak Daerah	2	100%	4	200.000.000	2	200.000.000	0
		2. Analisis dan Perencanaan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	1	100%	4	500.000.000	1	500.000.000	0
		3. Peningkatan dan Pelaksanaan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Kebijakan Pajak Daerah	0	100%	3	1.400.000.000	0	0	1.320.000.000

	4. Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Perkebunan Pajaleh Daerah	11	104	1.334.364.774	0	2.424.401.49	11	104	1.334.364.774	60	3.360.444.910
	5. Pendirian dan Peralaksanaan Objek Pajak Baru	12	549	348.251.463	21	640.140.000	12	549	1.590.260.000	36	2.330.430.081
	6. Pengisian, Pemeliharaan, dan Peralaksanaan Objek Pajak Daerah	13	149	1.040.444.212	28	1.040.000.000	17	1.600	1.200.000.000	46	2.660.790.040
	7. Pemeliharaan dan Peralaksanaan Objek Pajak Daerah	14	200	4.314.355.219	38,7	1.277.512.023	10.000	000	1.500.000.000	48.371	2.874.662.715
	8. Peningkatan dan Pemeliharaan Objek Pajak Daerah	15	180	263.818.147	28,7	536.201.419	33.000	000	101.200.000	67.236	741.818.708
	9. Pelayanan dan Pemeliharaan Objek Pajak Daerah	16	769	425.052.790	51,9	271.223.528	16.700	000	307.423.400	79.120	808.742.928
	10. Pemeliharaan dan Peralaksanaan Objek Pajak Daerah	17	1.000	140.260.522	307,200	557.274.550	20.000	000	103.200.000	219.857	600.570.005
	11. Penyelenggaraan dan Peralaksanaan Objek Pajak Daerah	18	204	1.034.402.460	0	2.061.258.820	3	000	642.000.000	78	3.043.598.000
	12. Penyelenggaraan dan Peralaksanaan Objek Pajak Daerah	19	204	206.340.276	4	243.712.480	1	000	80.000.000	7	242.300.280
	13. Penyelenggaraan dan Peralaksanaan Objek Pajak Daerah	20	000	549.189.702	6	1.557.200.000	7	000	200.000.000	12	1.820.402.710
	14. Penyelenggaraan dan Peralaksanaan Objek Pajak Daerah	21	549	177.171.200	0	373.000.760	4	000	90.000.000	20	472.640.210

1. Kegiatan Pemasaran dan layanan keagenan secara langsung	Jumlah Pemasaran dan layanan keagenan secara langsung	1 paket	82.154.000	2 Paket	164.308.000	1 Paket	164.308.000	2	82.154.000	4	329.016.000
2. Pendidikan dan Pelatihan/Workshop/Forum/Forum	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan tersebut	12 Orang	99.307.000	3 Orang	297.921.000	12 Orang	118.425.000	5	592.072.500	7	188.891.000
3. Berbagi Sesi informasi/Perencanaan/Workshop/Workshop	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan tersebut	25 Orang	320.000.000	40 Orang	1.280.000.000	25 Orang	786.014.000	25	3.926.014.000	40	1.088.643.500
4. Kegiatan lainnya		100%	2.412.437.800	100%	2.412.437.800	100%	3.370.380.199	100%	3.370.380.199	2	3.798.816.000
5. Penyediaan Konsumsi/Minuman/Logistik/Perawatan/Bangunan/Gedung	Jumlah Paket Konsumsi/Minuman/Logistik/Perawatan/Bangunan/Gedung yang disediakan	2 Paket	42.371.000	8 Paket	169.488.000	2 Paket	130.200.000	3	36.780.000	11	168.805.100
6. Penyediaan Perakitan dan Pemasangan Kabinet	Jumlah Paket Perakitan dan Pemasangan Kabinet	4 Paket	1.075.338.000	7 Paket	1.782.522.000	4 Paket	1.782.522.000	7	1.782.522.000	14	3.094.887.700
7. Penyediaan Jasa Logistik	Jumlah Paket Jasa Logistik	1 Paket	43.908.000	24 Paket	1.053.792.000	1 Paket	1.053.792.000	4	33.285.200	28	142.346.800
8. Penyediaan Ruang/Gedung dan Peralatan/Perlengkapan	Jumlah Penyediaan Ruang/Gedung dan Peralatan/Perlengkapan yang disediakan	1 Paket	33.300.000	22 Paket	712.660.000	1 Paket	170.377.200	3	33.300.000	25	182.346.800
9. Penyediaan Lahan/Bangunan/Perakitan/Perlengkapan/Perlengkapan	Jumlah Lahan/Bangunan/Perakitan/Perlengkapan/Perlengkapan yang disediakan	1 Sesi	3.940.000	3 Sesi	11.820.000	1 Sesi	3.940.000	4	3.940.000	7	11.820.000
10. Fasilitas Marketing/Tempa	Jumlah Fasilitas Marketing/Tempa	12 Sesi	50.000.000	25 Sesi	1.250.000.000	12 Sesi	142.305.000	12	60.000.000	37	35.110.000

RELEVAN PENCELAHAAN PELAKU DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEWAJIBAN

1. Perencanaan Rincian Investasi dan Kebutuhan SPPE	12	14	20	22	14	12	12	12	12	12	34	1,561.153.000
Kegiatan:												
Pengadaan barang/ jasa Dienst/ Peralangan/ Layanan/ Pemasangan/ Dan lain-lain	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	2.776.220.000
Sub Kegiatan:											4	940.865.000
1. Pengadaan Kebutuhan Jasa Operasional/ Jasa Logistik	0	3	-	4	100%	3.776.220.000	-	-	-	-	4	3.776.220.000
Sub Kegiatan:												
Pengadaan Jasa Pengalangan/ Jasa Pemasangan/ Dan lain-lain	100%	100%	100%	100%	100%	1.736.736.319	-	-	-	-	4	2.317.866.614
1. Penyediaan Jasa Sewa/ Mewakili	4	14	33.240.000	2	100%	145.000.000	-	-	-	-	6	313.340.000
2. Pengadaan Jasa Sewa/ Mewakili/ Jasa Logistik/ Dan lain-lain	4	14	476.076.000	28	100%	1.281.236.319	-	-	-	-	28	2.114.452.811
Kegiatan:												
Investasi/ Pengalangan/ Jasa Pengalangan/ Dan lain-lain	100%	100%	100%	100%	100%	3.216.972.319	-	-	-	-	34	4.110.088.515
Sub Kegiatan:												
1. Penyediaan Jasa Sewa/ Mewakili/ Jasa Logistik/ Dan lain-lain	37	14	624.552.000	10	100%	1.061.818.300	-	-	-	-	46	2.263.022.307

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

Setelah diberlakukannya Nomenklatur dinas yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi No. 14 Tahun 2016 sebagai pengganti Peraturan Daerah Kota Jambi No. 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota maka berubah pula Nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). Sedangkan, uraian tugas pokok dan fungsi BPPRD didasarkan pada Peraturan Walikota Jambi Nomor. 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota tersebut, BPPRD Kota Jambi berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Jambi di bidang pendapatan daerah. Adapun tugas pokok dari BPPRD adalah melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Pelaysnan yang diberikan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi adalah melayani Wajib Pajak (WP), dan memudahkan Wajib Pajak Melakukan pembayaran melalui Bank yang ditunjuk melakukan kerjasama seperti Bank 9 Jambi, Bank Bukopin, Bank BTN, Bank OCBC NISP, Bank BNI, Bank CIMB Niaga Syariah, loket-loket Kantor POS, dan Bank Mandiri.

Adapun pajak daerah yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi terdiri dari :

1. Pajak Reklame
2. Pajak Air Tanah
3. Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
5. Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

Sedangkan retribusi daerah yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi adalah Retribusi Sewa Panggung Billboard

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber penerimaan daerah khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) sumber-sumber penerimaan daerah yang bersifat potensial haruslah digali secara maksimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pajak daerah oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah Kota Jambi sebagai lembaga teknis penghasil PAD dalam bidang pajak daerah.

Dalam menjalankan tugasnya Bpprd mempunyai Fungsi yaitu :

1. Perumusan Kebijakan bidang Pengelolaan Pendapatan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan, Penilaian, Penetapan Pajak Daerah;
4. Pelaksanaan Pengisian Pajak Daerah, dan Penyelesaian Piutang, Keberatan, Pemeriksaan Pajak Daerah, Pengendalian dan Perindakan.
5. Pelaksanaan Pembukuan, Pelaporan, Pengolahan Data, dan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Sistem.
6. Pelaksanaan Pengembangan dan Perencanaan Program Pajak Daerah dan Pengkajian Peraturan Pajak Daerah, Pembinaan terhadap Wajib Pajak Daerah serta Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Pelaksanaan Koordinasi dengan Instansi terkait untuk Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah
8. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

a. Organisasi

Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi telah mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi, dengan susunan organisasi yang terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan yang

membawahi 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 9 (sembilan) Subbag/subbid dan 6 (enam) Jabatan Fungsional Tertentu.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari :

Tabel 2.5 Data Jumlah Pegawai BPPRD

No.	Uraian Kepegawaian			Jumlah (Orang)
I	Jenis kepegawaian			
	PNS			66
	Tenaga Kontrak OPD			40
II	Jenis Kelamin			
	1. LAK-LAKI			51
	2. PEREMPUAN			55
III	Jenjang Kepangkatan			
	Golongan IV/c			1
	Golongan IV/b			1
	Golongan IV/a			1
	Golongan III/d			21
	Golongan III/c			9
	Golongan III/b			11
	Golongan III/a			8
	Golongan II/d			5
	Golongan II/c			6
	Golongan II/b			0
	Golongan II/a			1
	IV	Jenjang Eselon		
Eselon II			1	
Eselon III/a			1	
Eselon III/b			4	
Eselon IV			9	
JFT			3	
V	Jenjang Pendidikan	PNS	Non PNS	Jumlah
	Strata 2	13	2	16
	Strata 1	37	23	59
	Diploma 3	8	6	13
	SLTA	8	9	17

	SD	1	0	1
	TOTAL	66	40	106

b. Pendapatan Daerah

Dari tabel dibawah ini terlihat perkembangan Pendapatan Daerah yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi kurun waktu Tahun 2023 s/d 2024.

**Tabel 2.6 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Jambi
Tahun 2023 s/d 2024**

NO.	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
		2023			2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	371.478.407.502	327.836.731.348	88,20	346.479.407.047	332.993.971.097	96,11
	Pajak Daerah	370.000.000.000	320.296.715.240	87,92	345.000.000.000	330.037.785.840	95,98
1	Pajak Hotel	30.000.000.000	24.228.723.881	80,76	0	0	0
a.	Pajak Hotel	29.377.530.000	23.742.820.525	80,89	0	0	0
b.	Rumah Kost	622.500.000	485.903.356	74,98	0	0	0
2	Pajak Restoran	85.000.000.000	71.472.166.912	84,08	0	0	0
a.	Restoran	55.000.000.000	44.218.854.388	80,40	0	0	0
b.	Rumah Makan	14.000.000.000	10.860.108.666	77,57	0	0	0
c.	Cafe	6.500.000.000	5.528.950.549	85,06	0	0	0
d.	Kantin / Waring Kopi	0.000.000.000	9.324.899.518	116,64	0	0	0
e.	Catering	1.000.000.000	533.093.719	63,37	0	0	0
f.	Bar	450.000.000	935.693.072	201,26	0	0	0
3	Pajak Hiburan	19.201.000.000	16.652.493.257	87,49	0	0	0
a.	Tontonan Film/ Bioskop	9.000.000.000	7.028.095.034	78,95	0	0	0
b.	Pageran Kesenian/ Musik/Tari Bazaar	37.000.000	205.782.530	556,11	0	0	0
c.	Discothek, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	2.700.000.000	1.723.840.848	63,81	0	0	0
d.	Situs / Akrobat/Galap	12.000.000	27.094.000	225,78	0	0	0
e.	Permainan Bilyar	75.000.000	50.580.829	67,44	0	0	0

PENGELUARAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

1	Batas Kendaraan Bermotor dan Pemeliharaan Kelengkapan	4.622.000.000	5.381.139.532	116,58	0	0	0
2	Pasir Pijat/ Refleksi, Mandi Uap/ SPA, dan Pasir Ketugeron/ Fitness	1.733.000.000	1.435.423.223	85,44	0	0	0
3	Pertandingan Olahraga	25.000.000	0	0	0	0	0
4	Pajak Reklame	33.503.000.000	9.799.744.137	29,48	0.600.000.000	9.981.416.433	103,97
a	Papan/ Bill Board/ Videotron/ Megatron	28.909.242.070	8.135.881.424	28,14	0.600.000.000	8.887.801.389	156,71
b	Kan	3.011.212.904	889.794.188	29,54	2.600.000.000	870.326.004	33,47
c	Melekat/ Seder	170.215.028	42.142.350	24,76	400.000.000	5.964.000	1,48
d	Sekbaran	40.461.320	0	0	300.000.000	22.500	0,01
e	Berjalan	357.264.594	151.453.314	42,39	300.000.000	218.885.526	72,30
f	Udara	31.664.020	0	0	200.000.000	0	0
g	Pengisian	79.620.018	700.900	0,88	200.000.000	874.326	0,34
5	Pajak Penerangan Jalan	74.000.000.000	79.118.889.008	106,91	0	0	0
a	Pajak Penerangan Jalan	74.000.000.000	79.118.889.008	106,91	0	0	0
6	Pajak Parkir	22.000.000.000	6.611.781.021	30,05	0	0	0
a	Pajak Parkir	22.000.000.000	6.611.781.021	30,05	0	0	0
7	Pajak Air Tanah	6.049.000.000	633.930.883	10,48	660.000.000	1.474.356.149	155,20
a	Pajak Air Tanah	6.049.000.000	633.930.883	10,48	660.000.000	1.474.356.149	155,20
8	Pajak Sengul Burung Walet	0	0	0	0	0	0
a	Pajak Sengul Burung Walet	0	0	0	0	0	0
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0	0	0	0	0	0
a	Tanah	0	0	0	0	0	0
b	Batu-Batuan	0	0	0	0	0	0
c	Pasir	0	0	0	0	0	0
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan	31.250.000.000	33.241.116.074	106,37	35.000.000.000	32.546.035.743	98,83

REKAPITULASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH AGT 2020

a	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	31.250.000.000	33.241.116.074	106,37	33.000.000.000	32.549.003.743	98,53
11	B P H T B	31.250.000.000	33.241.116.074	106,37	33.000.000.000	32.549.003.743	98,53
a	Pembiayaan Haji	67.000.000.000	61.201.307.967	121,20	61.000.000.000	72.610.740.722	85,64
b	Pemberian Haji Bani	3.000.000.000	2.936.542.250	97,95	1.000.000.000	4.160.746.150	416,07
12	Pajak Barang dan Jasa Tertentu	0	0	0	219.450.000.000	209.259.876.962	95,38
a	PSJT-Makanan dan/atau Minuman				87.500.000.000	77.600.432.800	88,69
b	PSJT-Tenaga Listrik				61.000.000.000	64.532.962.523	105,79
c	PSJT-Jasa Perhotelan				27.950.000.000	26.858.000.907	96,05
d	PSJT-Jasa Parkir				6.500.000.000	3.782.700.440	58,20
e	PSJT-Jasa Katering dan Hiburan				16.500.000.000	16.486.736.660	99,92
JUMLAH PAJAK DAERAH		378.000.000.000	325.296.715.240	87,51	345.000.000.000	336.066.169.245	95,67
Retribusi Pemakaian Kekayaan Milik Pemerintah Daerah		30.000.000	0	0	30.000.000	0	0
a	Sewa Panggung Billboard	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0
JUMLAH RETRIBUSI DAERAH		30.000.000	0	0	30.000.000	0	0
Pendapatan Denda Pajak		1.448.407.502	2.339.016.109	161,48	1.448.407.502	2.956.277.956	204,41
a	- Hotel	66.141.438	109.478.402	164,13	66.141.438	174.063.136	263,14
b	- Restoran	69.542.648	300.017.001	431,42	69.542.648	450.996.233	648,52
c	- Hiburan	43.676.642	34.907.325	80,11	43.676.642	120.937.124	277,24
d	- Reklame	263.662.367	151.716.336	57,58	263.662.367	183.888.371	69,80
e	- Mineral Bukan Logam	34.400	0	0	0	0	0
f	- Parkir	10.668.026	73.917.533	693,12	10.668.026	236.351.079	2.211,14
g	- Air Tanah	2.661.671	5.366.153	199,73	2.661.671	14.511.120	496,91
h	- PBB	1.000.000.000	1.663.613.689	166,38	1.000.000.000	1.773.790.983	177,38
JUMLAH PENDAPATAN DENDA PAJAK		1.448.407.502	2.339.016.109	161,48	1.448.407.502	2.956.277.956	204,41
999 JUMLAH SELURUH PENERIMAAN		171.476.407.502	327.635.731.349	191,20	346.476.407.047	333.012.447.155	96,11

Dengan melihat perkembangan pendapatan daerah yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi, maka dapat dirumuskan faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

- a. Posisi strategis Kota Jambi sebagai pusat perdagangan, jasa dan industri serta pintu gerbang Provinsi Jambi.
- b. Meningkatkan pelayanan yang transparan.
- c. Meningkatkan system pengolahan data dan pelayanan pajak dan retribusi yang terintegrasi, akurat berbasis teknologi informasi.
- d. Meningkatkan sumber daya aparatur yang handal dan berintegrasi, berdedikasi serta amanah.
- e. Menumbuhkembangkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
- f. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui : Bintek, Magang, Studi Banding dan lain-lain.
- g. Pemberdayaan masyarakat (wajib pajak) melalui : Surat Panggilan, Surat Teguran, Surat Peringatan kepada wajib pajak;
- h. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang pajak daerah melalui : Sosialisasi/Penyuluhan langsung, Media Televisi / Elektronik, Media Cetak, Brosur / Famplet, Banner dan Media Informasi lainnya.
- i. Penyempurnaan system administrasi penerima pajak daerah;
- j. Peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana dengan mengajukan usulan penambahan anggaran kepada TAPD dalam rangka menunjang kegiatan operasional Dinas;
- k. Peninjauan kembali / merevisi Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Walikota (Perwal) tentang Pajak Daerah yang disesuaikan dengan kondisi lapangan.
- l. Melaksanakan sistem computerized penerimaan pajak daerah (*e-payment*), dan
- m. Penyempurnaan sistem administrasi penerimaan pajak daerah.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- Masalah Internal
 - Terbatasnya tenaga teknis dibidang pemeriksaan dan penyidik pajak daerah, juru sita dan tenaga penyuluhan pajak daerah.
 - Kesulitan penagihan PBB karena wajib pajak diluar daerah, subjek dan objek pajak tidak ditemukan.
 - Belum adanya kebijakan terkait penghapusan pokok pajak piutang
 - Beberapa sistem aplikasi yang ada masih belum terintegrasi dan masih parsial.

- Masalah Eksternal
 - Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah dan masih adanya wajib pajak yang melakukan kecurangan dalam menentukan besaran perhitungan pengenaan pajaknya sehingga berpotensi mengurangi penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah.
 - Kondisi perekonomian berskala nasional maupun internasional yang berpengaruh terhadap pendapatan daerah.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan RKPD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2026 akan digunakan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan tahun 2026, hal ini disebabkan karena program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi bersifat rutin dan terus menerus.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD IREINSTR

 SOP: Bagan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
 Tabel 2.7

RANCANGAN AWAL IREINSTR			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PEMENDAGRI 90 TAHUN 2019				LOKASI
NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/Piutang Individu	2024	2028	
1	Program: Peningkatan Pendapatan Daerah Kegiatan: Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pemenuhan Pajak dan Retribusi Daerah Persentase Pertumbuhan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah	100% 9%	300.000.000.000 11.718.121.272	468.900.000.000 1.285.085.549	Kota Jember	
	Sub Kegiatan: 1	Jumlah Dokumen Rencana Penghasilan Pajak Daerah	2 Dokumen	56.783.125			
	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Peningkatan Kelengkapan Pajak Daerah	1 Dokumen	301.519.549			
		Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kelengkapan Pajak Daerah	2 Dokumen	11.577.057			
		Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kelengkapan Pajak Daerah	1 Dokumen	301.519.549			

3	Penyusunan dan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kegiatan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Pajak Daerah	6 Laporan	3	630.780.024	6 Laporan	Penyusunan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Pajak Daerah	6 Laporan	172.960.395
4	Penyedia Sarana dan Prasarana Kegiatan Pajak Daerah	Jumlah Penyediaan sarana Penyelenggaraan Pajak Daerah	9 unit	4	1.461.480.190	9 unit	Penyedia Sarana dan Prasarana Kegiatan Pajak Daerah	Jumlah Penyediaan sarana Penyelenggaraan Pajak Daerah	6 unit	294.380.319
5	Pencapaian dan Penertarikan Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pencapaian dan Penertarikan Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	5	380.076.545	12 Laporan	Pencapaian dan Penertarikan Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pencapaian dan Penertarikan Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	42.265.440
6	Penyediaan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Basis Data	Jumlah Laporan Hasil Pengumpulan, Pemeliharaan dan pengawasan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	7	1.633.018.633	12 Laporan	Penyediaan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Basis Data	Jumlah Laporan Hasil Pengumpulan, Pemeliharaan dan pengawasan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	97.111.321
7	Pembinaan Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PBBP2) serta Bas Penghasilan dan Tanah dan Bangunan	Jumlah Objek Pajak yang diawasi PBBP2	10.000 Objek	8	4.767.820.240	10.000 Objek	Pembinaan Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PBBP2) serta Bas Penghasilan dan Tanah dan Bangunan	Jumlah Objek Pajak yang diawasi PBBP2	10.000 Objek	44.274.387
8	Jumlah Dokumen Koneksi Pajak	Jumlah Dokumen Koneksi Pajak	30.000 unit	9	302.910.000	30.000 unit	Pemrosesan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Koneksi Pajak	30.000 unit	84.716.078
9	Penerimaan dan Normalisasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan dan Normalisasi Pajak Daerah	30.768 Laporan	10	618.534.034	30.768 Laporan	Penerimaan dan Normalisasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan dan Normalisasi Pajak Daerah	30.768 Laporan	97.985.180
10	Pembelian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Pembelian dan Verifikasi	35.000 Pembelian	10	113.979.886	35.000 Pembelian	Pembelian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Pembelian dan Verifikasi	35.000 Pembelian	20.225.297

11	Peningkatan Pagar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Peninjauan Peningkatan Pagar Daerah	3 Dokumen	1.137.942.750	11	Peningkatan Pagar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Peninjauan Peningkatan Pagar Daerah	3 Dokumen	81.827.000	
12	Pengembangan Kebersihan Pagar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Peninjauan Kebersihan Pagar Daerah	1 Dokumen	235.274.300	12	Pengembangan Kebersihan Pagar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Peninjauan Kebersihan Pagar Daerah	1 Dokumen	13.000.300	
13	Pengendalian Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Urusan Pagar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Peninjauan Pemeliharaan serta Peningkatan dan Peningkatan Pagar Daerah	2 Dokumen	572.205.250	13	Pengendalian Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Urusan Pagar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Peninjauan Pemeliharaan serta Peningkatan dan Peningkatan Pagar Daerah	2 Dokumen	305.073.410	
14	Pembinaan dan Pengembangan Pengabdian Rukhul Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Peninjauan dan Pengembangan Pengabdian Rukhul Daerah	4 Laporan	194.988.500	14	Pembinaan dan Pengembangan Pengabdian Rukhul Daerah	Jumlah Laporan Hasil Peninjauan dan Pengembangan Pengabdian Rukhul Daerah	4 Laporan	69.089.200	
Program	Pemangangan Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	Indeks Referensi Bincokasi Pemangangan Daerah	98%	26.770.767.383	Program	Pemangangan Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	Indeks Referensi Bincokasi Pemangangan Daerah	100%	31.792.791.151	Kuda Jember
Kegiatan	Penyediaan Jasa Perancang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Perancang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	387.444.000	Kegiatan	Penyediaan Jasa Perancang Urusan Pemerintahan Daerah	Terdapat Penyediaan Penyediaan Jasa Perancang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	343.300.000	
Sub Kegiatan					Sub Kegiatan					
1	Penyediaan Jasa Survei/Manajemen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Survei/Manajemen	4 laporan	63.944.000	1	Penyediaan Jasa Survei/Manajemen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Survei/Manajemen	4 laporan	7.500.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang diserahkan	4 Laporan	523.500.000	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang diserahkan	4 Laporan	636.000.000	
Kegiatan	Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sosial	100%	1.811.555.875	Kegiatan	Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah	Terdapat Penyediaan Administrasi Urusan	100%	314.840.700	Kuda Jember

Sub Kegiatan: 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Evaluasi Kinerja Program dan cara	Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Evaluasi Kinerja Program dan cara	3 Dokumen	1.311.696	1	Sub Kegiatan:	Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Evaluasi Kinerja Program dan cara	1 Dokumen	1.311.696
2	Evaluasi Kinerja Program dan cara	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Program dan cara	1 Laporan	1.819.802	2		Administrasi Keuangan	3 Laporan	1.334.525
Kegiatan	Administrasi Keuangan	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	99%	34.340.837.389			Administrasi Keuangan	100%	20.046.440.820
Sub Kegiatan: 1	Penyusunan Gagasan dan Tunjangan ASN	Jumlah Perencanaan Gagasan dan Tunjangan	80 Orang	20.680.912.848	1	Sub Kegiatan:	Penyusunan Gagasan dan Tunjangan ASN	80 Orang	20.680.912.848
2	Perencanaan Perencanaan dan Pengalokasian Anggaran (DIPA)	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Keuangan, Asst. dan Pengadaan Barang/Jasa	4 Dokumen	282.157.190	2		Fidusia dan Perencanaan dan Pengalokasian Anggaran (DIPA)	2 Dokumen	318.883.770
3	Konfirmasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan (Realisasi dan Realisasi) dan SPPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan (Realisasi dan Realisasi) dan SPPD	2 Laporan	112.967.260	3		Konfirmasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan (Realisasi dan Realisasi) dan SPPD	2 Laporan	3.015.300
TOTAL				38.041.867.030		TOTAL			32.966.457.369

BAB III

TUJUAN, SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan secara nasional sangat bergantung dengan sinergitas kebijakan antar pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat, dan antar pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah pusat dan provinsi. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2025-2029 yang hendak dicapai adalah *Kota Perdagangan dan Jasa Yang Bersih, Aman, Harmonis, Agamis, Inovatif dan Sejahtera*. Salah satu misi dari pembangunan Kota Jambi periode 2025-2029 adalah Penguatan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik yang merupakan misi ke-3, dengan tujuan meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik dengan cara penguatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah..

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi adalah unsur pelaksana otonomi daerah untuk menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Jambi dibidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi berkewajiban untuk mendukung pencapaian misi ke tiga tersebut dengan meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah sehingga dapat menjadi sumber pembangunan bagi Kota Jambi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 memiliki tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan sehingga program dan kegiatan di BPPRD Kota Jambi mendukung Misi Ke 3 (tiga) (Penguatan Tata Kelola Pemerintah). Dengan salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Memperhatikan hal tersebut maka tujuan dan sasaran Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

Tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi adalah 'Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah'.

b. Sasaran Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

Adapun sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi adalah 'Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah'.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2025

Tabel 3.1

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah	Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah	
				Pajak	468.000.000.000
				Retribusi Sewa Panggung Billboard	30.000.000

c. Target Pajak Daerah Tahun 2025

Target pendapatan pajak daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi adalah sebesar Rp.468.000.000.000,- serta untuk target untuk retribusi sewa panggung billboard adalah sebesar Rp.30.000.000,- , dengan rincian sebagai berikut :

Target Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2026

NO.	JENIS PAJAK	TARGET 2026
1	Pajak Reklame	8,000,000,000
2	Pajak Air Tanah	6,000,000,000
3	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	33,000,000,000
4	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	68,000,000,000
5	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	208,000,000,000
a	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	77,000,000,000
b	PBJT-Tenaga Listrik	85,000,000,000
c	PBJT-Jasa Perhotelan	25,000,000,000
d	PBJT-Jasa Parkir	5,000,000,000
f	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	16,000,000,000
6	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	120,000,000,000
7	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	25,000,000,000
	TOTAL	468,000,000,000

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adapun program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi tahun 2026 meliputi :

TABEL 3.2
TABEL RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SMPRO TAHUNAN 2020
DAN PRABUJAK MAJU TAHUN 2027

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	2020				Prakiraan Maja Rencana Tahun 2027	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Paga Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Paga Indikatif
1	Program Kegiatan:	Realisasi pemenuhan pajak dan retribusi daerah Peningkatan Pendapatan Pajak dan retribusi daerah	Kota Jambi	100%	1.200.000.000	APBD	100%	2.378.043.000
			Kota Jambi	5%	1.200.000.000	APBD	5%	2.378.043.000
Sub Kegiatan:								
1	Perencanaan pengumpulan pajak daerah	Jumlah dibayar rencana pengumpulan pajak daerah		2 Desember	12.107.000		2 Desember	19.730.700
2	Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyelenggaraan Kegiatan Pajak Daerah	Jumlah Ekuitas Hasil Arah Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kegiatan Pajak Daerah		1 Desember	34.315.750		1 Desember	37.267.302
3	Strategi dan Penyelenggaraan Kegiatan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penulisan dan pengumpulan kegiatan pajak daerah		6 Laporan	172.990.790		6 Laporan	190.250.870
4	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah		4 unit	284.305.319		11 Unit	323.140.250
5	Perencanaan dan Pembentukan Cagar Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Penelitian Cagar Pajak Daerah, Subjek pajak dan Wajib Pajak Daerah		12 Laporan	42.205.440		12 Laporan	46.420.800
6	Pengujian, Pemeliharaan,	Jumlah Laporan Hasil Pengujian,		12 Laporan	11.111.000		12 Laporan	1.088.640.740

REKAM JEJAK PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN PROGRAM KEGIATAN JARI

Kategori	1 Laporan	1.3M-5.2M	APBD	2 Laporan	1.067.978
Kegiatan:	100%	29.965.449.630	APBD	100%	32.966.953.179
Sub Kegiatan:					
1	60 Orang	29.037.001.000		60 Orang	32.007.247.100
2	2 Dukuman	209.003.700		2 Dukuman	360.038.729
3	2 Laporan	3.915.000		2 Laporan	4.307.409
Kegiatan:	70,7%	101.962.960	APBD	70,7%	201.463.208
Sub Kegiatan:					
1	1 Paket	90.000.000		1 Paket	90.000.000
2	Orang	0		2 Orang	40.285.300
3	10 Orang	111.961.000		21 Orang	112.178.000
Kegiatan:	100%	214.961.700	APBD	100%	242.100.304
Sub Kegiatan :					
1	2 Paket	14.215.010		2 Paket	15.833.511
2	4 Paket	78.112.106		4 Paket	82.263.728
3	1 Paket	8.082.880		1 Paket	8.423.075

	4	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Peralatan Produksi	Jumlah Duitaan bahan baku dan peralatan pendukung yang dibutuhkan	1 Duitaan	850.000		1 Duitaan		17.930.480
	5	Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan	Jumlah alat yang rusak dan penggantian yang dibutuhkan	1 Peralat	10.200.500		7 Peralat		960.000
	6	Facilities Kurungan Ternak	Jumlah Laporan/infocast Kurungan Ternak	12 Laporan	5.220.000		4 Laporan		5.857.300
	7	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Komunikasi SORP	Jumlah laporan penyediaan rapat koordinasi dan komunikasi SORP	12 Laporan	200.000.000		4 Laporan		200.000.000
Kegiatan		Pengadaan Barang Milik Daerah Peningkatan Pemertanian Daerah	Pembelian Pemukiman Sisa dan Pemertanian Sisa dengan Rencana Keluaran Barang Milik Daerah (RKBMD)	0	0	APRO	APRO		880.000.000
Sub Kegiatan									
	1	Pengadaan Kebutuhan Operasional atau Laporan	Jumlah Unit Kebutuhan Dasar Operasional atau Laporan yang disediakan	0	0			1 Unit	880.000.000
Kegiatan		Penyediaan Jasa Peningkatan Pemertanian Daerah	Pembelian Pemukiman Sisa Peningkatan Pemertanian Daerah	100%	340.500.000	APRO	APRO	100%	600.000.000
Sub Kegiatan									
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan	7.500.000			4 Laporan	8.250.000
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Manusia Lainnya	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Manusia Lainnya yang dibutuhkan	4 Laporan	5.300.000.000			4 Laporan	600.000.000
Kegiatan		Pembayaran Barang Milik Daerah Peningkatan Pemertanian Daerah	Pembayaran Peningkatan Barang Milik Daerah (RKBMD) Jalan Kondisi Baru (Lapak Baru)	100%	700.930.280	APRO	APRO	100%	800.413.000
Sub Kegiatan									
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Perbaikan, Penggantian, Pelebaran, Peningkatan, dan Pemertanian	Jumlah pekerjaan di area pemertanian dan lapangan yang difixasi dan dibayarkan sejak dan seterusnya	37 Unit	567.870.000			37 Unit	704.443.000
	2	Pembayaran Perbaikan dan Pemertanian	Jumlah perbaikan dan pemertanian yang dibayarkan	101 Unit	70.427.280			101 Unit	77.470.300
	3	Pembayaran Pemertanian	Jumlah Gubuk Kambing dan bangunan	3 Unit	25.000.000			1 Unit	27.580.300

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk tahun anggaran 2026 memiliki 1 (satu) program rutin yang terdiri dari :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Dengan 6 (Enam) Kegiatan dan 21 (Dua puluh satu) Sub Kegiatan
Serta 1 (satu) program urusan yaitu :
- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Dengan 1 (satu) Kegiatan dan 14 (Empat belas) Sub kegiatan adapun rincian pendanaan untuk program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Program/Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2026

Tipe	Indikator Tujuan	Elemen	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	2026					
						Rp	Tingkat				
1	2	3	4	5	6	7	8				
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Saluran Pajak dan Retribusi Daerah Meningkatkan Penanaman Pajak dan Retribusi Daerah Meningkatkan Penanaman Pajak dan Retribusi Daerah Meningkatkan Penanaman Pajak dan Retribusi Daerah	Meningkatkan Penanaman Pajak dan Retribusi Daerah Meningkatkan Penanaman Pajak dan Retribusi Daerah Meningkatkan Penanaman Pajak dan Retribusi Daerah Meningkatkan Penanaman Pajak dan Retribusi Daerah	Meningkatkan Penanaman Pajak dan Retribusi Daerah Meningkatkan Penanaman Pajak dan Retribusi Daerah Meningkatkan Penanaman Pajak dan Retribusi Daerah Meningkatkan Penanaman Pajak dan Retribusi Daerah	Meningkatkan Penanaman Pajak dan Retribusi Daerah Meningkatkan Penanaman Pajak dan Retribusi Daerah Meningkatkan Penanaman Pajak dan Retribusi Daerah Meningkatkan Penanaman Pajak dan Retribusi Daerah	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Retribusi Dibayar Perangkit Daerah	21.752.791,01	A				
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perhitungan Nilai ASH	2.726.460	B3				
				Sub Kegiatan:							
				1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.201.940	1 Dokumen				
				2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.524.520	1 Laporan				
				Kegiatan Administrasi dan Anggar Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	26.992.648,000	100%				
				Sub Kegiatan:							
				1. Periode dan Sarung ASN	Jumlah Orang yang Menempati Gaj dan Sarung ASN	25.612.551,000	60 Orang				
				2. Pelaksanaan Perencanaan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan APBD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan APBD	22.963.720	1 Dokumen				

RACON PENGELOLA PASIAR DAN REHABILITASI DI ERAT ROTA JAMBI

			3. Koneksi dan Penyusunan Laporan Keuangan Substansi/Turunan/Relevansi lainnya	Jumlah Laporan Keuangan Substansi/Turunan/Relevansi lainnya SPPD	3.975.830	1 Laporan
			Raport			
			Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	101.180.000	100%
			Sub Kegiatan :			
			1. Pengadaan Pakaian Dinas Bersepeda untuk Karyawan	Jumlah Pakaian Pakaian Dinas Bersepeda untuk Karyawan	30.000.000	1 Paket
			2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	0	Orang
			3. Bantuan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bantuan Teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	101.180.000	10 Orang
			Raport			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Umum (RKBU)	214.840.788	100%
			Sub Kegiatan :			
			1. Penyediaan Kebutuhan Indeks Lurah/Pemangku Perangkat Kantor	Jumlah paket kebutuhan Indeks Penyediaan Kebutuhan Perangkat Kantor yang disediakan	94.205.010	2 Paket
			2. Penyediaan Perawatan dan Penggantian Kantor	Jumlah paket Perawatan dan Penggantian Kantor yang disediakan	70.122.188	4 Paket
			3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	290.000	1 Paket
			4. Penyediaan Barang Bekas dan Penggantian	Jumlah paket barang bekas dan penggantian yang disediakan	15.305.000	2 Paket
			5. Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	Jumlah Dukungan Baku Bekerja dan perawatan perundang-undangan yang disediakan	680.000	1 Dukuman
			6. Fasilitas Kuryung Ternak	Jumlah Laporan Fasilitas Kuryung Ternak	5.305.000	4 Laporan
			7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kemitraan SPPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kemitraan SPPD	300.000.000	4 Laporan
			Raport			
			Pengadaan Jasa Perhutang Utang Pemertahanan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Umum (RKBU)	840.000.000	100%
			Sub Kegiatan :			
			1. Penyediaan Jasa Sewa Menyewa	Jumlah laporan penyediaan jasa sewa menyewa	7.000.000	4 Laporan
			2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	138.000.000	6 Laporan

Regenerasi				
	Peningkatan Ruang Milik Daerah Pemungut Utang Pemukiman Daerah	Persentase Peningkatan Ruang Milik Daerah (RMD) dalam Kondisi Baik (Jarak Pakat)		
		70.103.200	84%	
	Su- Kegiatan			
	1. Peningkatan Jasa Pemukiman, Gaya Pemukiman, Pakat, dan Perilaku Kemandirian Orang-orang Milik atau Lahan	Jumlah bentukan Denda Denda atau denda yang diberikan dan dikembalikan dan perannya	887.871.000	37.1%
	2. Peningkatan Perilaku dan Moral Lainnya	Jumlah Pakat dan Masa sewa yang diberikan	70.427.200	10.0%
	3. Peningkatan Perilaku Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/pekerjaan	35.000.000	2.0%
	Program			
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	406.000.000.000	100%
	Kegiatan			
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Perumbuhan Nilai Pajak Daerah	1.205.485.840	8%
	Su- Kegiatan			
	1. Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	17.337.007	2 Dokumen
	2. Audit dan pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Audit Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	34.215.704	10 Dokumen
	3. Penyusunan dan Penyusunan kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyusunan dan Penyusunan kebijakan Pajak Daerah	173.960.780	6 Laporan
	4. Peningkatan sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	294.305.310	4 Unit
	5. Peningkatan dan Peningkatan Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan dan Peningkatan Objek Pajak Daerah, Subjek pajak dan Objek Pajak Daerah	40.215.440	17 Laporan
	6. Peningkatan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	17.111.220	17 Laporan
	7. Peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBPD) serta Pajak Perumahan dan Tanah dan Bangunan (PHTB)	Jumlah Objek Pajak yang diberikan NPDP nya	44.704.360	1000 Objek Pajak
	8. Peningkatan Nilai Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Pajak Daerah	54.716.570	30.000 Dokumen
	9. Peningkatan dan kontrol Pajak Daerah	Jumlah Laporan dan kontrol Pajak Daerah	57.980.180	30.700 Laporan
	10. Peningkatan dan vertikalisasi Laporan Pajak Daerah	Jumlah Data per tahun pajak daerah yang telah diberikan pembiaran dan vertikal	30.220.280	30.000 Dokumen
	11. Penetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan penetapan pajak daerah	81.867.000	3 Dokumen

RABAN PENGZOLUPALAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA CIREBON

			12. Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil penyelesaian selanjutnya pajak daerah	13.250.363	1 Dokumen
			13. Pengabdian, Pemeliharaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil pemeliharaan serta pengabdian dan Pengawasan Pajak Daerah	205.071.418	2 Dokumen
			14. Penelitian dan Pengawasan Penghasilan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan hasil Penelitian dan Pengawasan Penghasilan Retribusi Daerah	60.000.000	4 Laporan
Total					32.985.457.000	

BAB V PENUTUP

Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi ini yang merupakan rangkaian rencana Program dan Kegiatan untuk tahun 2026, diharapkan dapat diinformasikan dan dikomunikasikan keseluruh aparat dalam organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi sehingga memiliki kesamaan pandangan mengenai gambaran kinerja yang akan dilaksanakan. Dengan demikian diharapkan pula agar program dan kegiatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2026 ini dapat terlaksana dan terkoordinasi dengan baik dan harmonis demi tercapainya tujuan strategis.

Jambi, Oktober 2025

KEPALA BADAN



Dr. H. ARDI, S.P., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700512 199803 1 004